

Analisis Sistem Pengendalian Intern untuk Mendukung Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola dan Teknologi Pemerintahan Daerah

Apria Yosa Saputri¹, Nedi Hendri², Ana Septiani^{3*}

^{1,2,3*} Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

E-mail: apriayosasaputri@gmail.com¹⁾
nedihendri1981@gmail.com²⁾
anaseptiani137@gmail.com^{3*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 25 Agustus
2025
Received in Revised 25
November 2025
Accepted 30 Januari
2026

Keyword's :
SPIP-T, Inspectorate,
Financial Accountability,
Governance,
Government Technology.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Integrated Government Internal Control System (SPIP-T) in supporting financial accountability, governance, and the use of information technology within the Inspectorate of Metro City. The research was conducted qualitatively using a descriptive method through interviews, documentation, and direct observation. The results show that SPIP-T has contributed to improving the effectiveness of supervision, work process efficiency, and financial reporting. However, several weaknesses were identified, such as budget planning that is not risk-based, misaligned budget allocations for supervision, and human resources whose competencies do not meet the required standards. SPIP-T was also found to be suboptimal in supporting the use of information technology. The study recommends strengthening human resource competencies, utilizing digital technology, and integrating risk-based supervision systems.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) dalam mendukung akuntabilitas keuangan, tata kelola, dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Inspektorat Kota Metro. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP-T telah berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, efisiensi proses kerja, dan pelaporan keuangan. Namun, ditemukan beberapa kelemahan seperti perencanaan anggaran belum berbasis risiko, ketidaksesuaian alokasi anggaran pengawasan, serta kompetensi SDM yang belum memenuhi standar. SPIP-T juga dinilai belum optimal dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi pengawasan berbasis risiko.

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: anaseptiani137@gmail.com

Peer review under responsibility of Expensive: Journal of Accounting and Finance. 2829-4807.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kompleksitas pengelolaan anggaran, tuntutan peningkatan pelayanan publik, serta tingginya risiko penyimpangan keuangan menuntut adanya sistem pengendalian intern yang terstruktur dan terintegrasi. Pemerintah Indonesia melalui Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan setiap instansi pemerintah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh. Kebijakan ini menjadi landasan normatif dalam memperkuat sistem pengawasan internal guna menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Seiring perkembangan paradigma pengawasan dan tata kelola pemerintahan, SPIP dikembangkan menjadi SPIP Terintegrasi (SPIP-T) yang diresmikan pada tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. SPIP-T dirancang untuk mengintegrasikan pengendalian intern dengan proses perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan terintegrasi ini menekankan pentingnya manajemen risiko dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar pengawasan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi preventif dan berbasis risiko.

Dalam konteks pemerintah daerah, peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat strategis. Inspektorat Kota Metro memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan tata kelola sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2023, tingkat maturitas SPIP-T Kota Metro masih berada pada Level 3 (Terdefinisi). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian telah dirancang dan mulai diterapkan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi secara konsisten dalam seluruh proses manajerial dan lintas fungsi organisasi.

Tabel 1. Tingkat Maturitas SPIP-T Kota Metro

Indikator	Nilai	Level
Maturitas SPIP-T	3,653	Level 3 (Terdefinisi)
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,628	Level 3 (Terdefinisi)
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,464	Level 3 (Terdefinisi)

Sumber: Laporan Evaluasi Maturitas SPIP-T, BPKP Provinsi Lampung, 2023

Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam implementasi SPIP-T di lingkungan Inspektorat Kota Metro. Perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis risiko sehingga efektivitas pengawasan belum optimal. Selain itu, alokasi anggaran pengawasan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2004 serta regulasi terkait lainnya. Sistem monitoring dan evaluasi pada setiap unit kerja juga belum berjalan secara efektif. Dari sisi sumber daya manusia, kompetensi APIP masih terbatas, tercermin dari rendahnya persentase pegawai yang memenuhi standar pelatihan minimal 120 jam per tahun. Di samping itu, penerapan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal, sehingga pelaporan belum real-time dan efisiensi kerja belum maksimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif SPIP-T dengan praktik implementasinya di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SPIP-T, mengevaluasi kesesuaian penganggaran pengawasan dengan regulasi yang berlaku, menilai efektivitas monitoring dan evaluasi, serta mengkaji peningkatan kompetensi SDM APIP dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat sistem pengendalian intern di Inspektorat Kota Metro sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis risiko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) pada Kantor Inspektorat Kota Metro. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, serta dokumentasi terkait penerapan SPIP-T. Penelitian dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kota Metro dengan fokus pada unit yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan evaluasi sistem pengendalian intern.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP-T, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2022) dan Moleong (2016), yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik dan sumber data guna menguji kredibilitas temuan penelitian.

Objek penelitian adalah implementasi SPIP-T di lingkungan Inspektorat Kota Metro, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengendalian

intern. Penelitian ini menelaah sejauh mana SPIP-T mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko dalam pengawasan internal pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber utama di Inspektorat Kota Metro serta dokumen hasil penilaian mandiri SPIP-T Tahun 2023, penelitian ini menghasilkan berbagai temuan terkait implementasi dan tingkat keberhasilan SPIP-T di Kota Metro. Berikut ini adalah rincian hasil penelitian yang mencakup tingkat maturitas SPIP-T, penilaian terhadap komponen SPIP-T, penerapan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi, serta tantangan yang dihadapi.

Perencanaan Berbasis Risiko

Perencanaan penganggaran yang berbasis risiko merupakan pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat mengatasi potensi risiko yang mungkin terjadi. Di Kantor Inspektorat Kota Metro, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti ketidakpastian dalam pendapatan daerah atau perubahan kebijakan. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Dengan demikian, Kantor Inspektorat dapat mengembangkan strategi mitigasi yang tepat, seperti alokasi dana cadangan untuk risiko tertentu. Rekomendasi untuk implementasi ini mencakup penggunaan alat analisis risiko yang dapat membantu dalam proses penganggaran, serta pelatihan bagi staf terkait untuk memahami pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam penganggaran.

Kesesuaian Anggaran Pengawasan

Kesesuaian anggaran pengawasan di Kantor Inspektorat Kota Metro sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan amanat peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2004. Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini, antara lain kurangnya pemahaman tentang peraturan di kalangan pengelola anggaran dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, proses penyusunan anggaran yang tidak melibatkan semua pemangku kepentingan juga dapat mengakibatkan anggaran yang tidak mencerminkan kebutuhan nyata. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar Kantor Inspektorat melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan anggaran kepada seluruh staf, serta melibatkan semua unit kerja dalam proses penyusunan anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan amanat peraturan.

Beberapa regulasi yang mendasari penerapan SPIP-T di Kota Metro antara lain :

- a. Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 20 Tahun 2021 tentang pedoman sistem penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Perwali ini memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur penanganan pengajuan dari masyarakat serta pengendalian pengajuan tersebut secara terstruktur dan transparan. Memberikan pedoman tentang sistem penanganan pengaduan masyarakat secara struktural dan transparan, namun belum menetapkan kebutuhan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pengaduan secara efektif. Seharusnya, penganggaran diarahkan untuk mendukung sarana sistem informasi pengaduan, pelatihan petugas, dan pengelolaan tindak lanjut laporan, agar pengawasan terhadap pengaduan berjalan optimal.
- b. Perwali Nomor 19 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kota Metro. Regulasi ini berfungsi untuk mengatur tindakan pencegahan dan pengendalian gratifikasi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Metro, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintah yang bebas dari korupsi. yang mengatur pengendalian gratifikasi, belum menyentuh aspek pendanaan kegiatan pengawasan terhadap potensi gratifikasi. Padahal, agar sesuai dengan regulasi, diperlukan penganggaran khusus untuk mendukung penyuluhan, sistem pelaporan gratifikasi, dan audit internal yang menyorot area rawan gratifikasi, sehingga pencegahan bisa berjalan secara terencana.
- c. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menjadi dasar dalam menyusun standar pengelolaan pengawasan dan pelaporan keuangan pemerintah. Mengamanatkan bahwa pengawasan atas pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efektif dan efisien, serta mempertimbangkan risiko. Namun, anggaran pengawasan di Kota Metro belum mengacu pada register risiko dan RTP secara menyeluruh. Agar sesuai, anggaran pengawasan perlu dirancang berdasarkan hasil identifikasi risiko, dengan fokus pada unit atau kegiatan yang memiliki dampak besar terhadap keberhasilan program dan potensi kerugian negara.

Pimpinan Inspektorat Kota Metro memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SPIP-T

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap unit kerja di Kantor Inspektorat Kota Metro dapat beroperasi secara optimal. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan teknologi informasi, dan prosedur yang tidak jelas. Kendala-

kendala ini menyebabkan kurangnya data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem monitoring yang ada dan pengembangan prosedur yang lebih jelas. Rekomendasi untuk mengatasi kendala ini termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan sistem informasi yang lebih baik untuk mendukung pengumpulan dan analisis data

Penilaian komponen SPIP-T Inspektorat Kota Metro melakukan penilaian terhadap komponen-komponen utama dari SPIP-T, yang terdiri dari penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan SPIP. Berikut adalah hasil penilaian komponen SPIP-T:

Tabel 2. Penilaian Komponen SPIP-T

Komponen	Skor	Level
Penetapan Tujuan	4,5	4 (Terintegrasi)
Struktur dan Proses	3,17	3 (Terdefinisi)
Pencapaian Tujuan SPIP	3,00	3 (Terdefinisi)

Sumber data: Inspektorat Kota Metro, 2024

- a. Penetapan Tujuan (4,5 - Level 4). Inspektorat Kota Metro telah memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta prosedur yang telah terintegrasi dengan baik dalam sistem pengendalian internal. Sudah tergolong baik dan hampir mendekati level tertinggi. Inspektorat Kota Metro telah memiliki tujuan yang terukur dan selaras dengan sistem pengendalian internal. Namun demikian, meskipun secara formal tujuan telah terintegrasi dalam dokumen dan perencanaan, masih diperlukan penguatan dalam penerjemahan tujuan tersebut ke dalam indikator kinerja yang lebih operasional di masing-masing unit kerja. Dengan kata lain, tujuan telah ditetapkan, namun pencapaian dan pengukuran kinerjanya masih belum sepenuhnya diinternalisasi ke seluruh OPD.
- b. Struktur dan Proses (3,17 - Level 3). Meskipun sudah terstruktur dengan baik, terdapat beberapa area yang masih membutuhkan perbaikan dalam koordinasi antar unit dan pelaksanaan proses pengendalian. Pelaksanaan SPIP-T telah memiliki struktur dasar dan prosedur formal, namun koordinasi antar unit kerja dan integrasi proses pengendalian masih lemah. Kegiatan monitoring dan tindak lanjut evaluasi belum sepenuhnya menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi, dan masih ada unit kerja yang belum aktif dalam siklus pengendalian internal. Agar sesuai dengan standar level 4 atau 5, struktur pengendalian harus terintegrasi dalam setiap proses kerja, dengan mekanisme umpan balik yang cepat dan berbasis data.

- c. Pencapaian Tujuan SPIP (3,00 - Level 3). Pencapaian tujuan SPIP sudah memadai, namun perlu lebih banyak upaya dalam memastikan bahwa setiap tujuan dapat tercapai dengan hasil yang optimal. implementasi SPIP telah berjalan, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini terjadi karena masih ada kendala dalam pelaksanaan rencana tindak pengendalian, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan sistem informasi. Idealnya, pencapaian tujuan SPIP tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi juga dari dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola, efisiensi anggaran, dan pencegahan risiko, yang masih belum optimal. Untuk mencapai kesesuaian penuh, dibutuhkan monitoring yang lebih kuat terhadap realisasi tindakan korektif dan penilaian keberhasilan yang berbasis hasil (outcome), bukan hanya output.

Kompetensi SDM APIP Belum Sesuai Standar

Kompetensi SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kantor Inspektorat Kota Metro perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar 120 jam pelatihan per orang per tahun. Saat ini, terdapat kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dan yang diharapkan, yang dapat menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dirancang program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek pengawasan dan akuntabilitas. Rekomendasi ini mencakup kolaborasi dengan lembaga pelatihan dan penyedia pendidikan untuk menyusun kurikulum yang relevan, serta pengembangan sistem evaluasi untuk mengukur peningkatan kompetensi SDM secara berkala

Untuk mengatasi hal ini, Inspektorat Kota Metro telah dan perlu terus mengembangkan beberapa strategi berikut:

- a. Pelatihan internal (in-house training) dan sharing session, untuk membekali pegawai dengan pengetahuan teknis mengenai SPIP-T, manajemen risiko, audit kinerja, dan teknologi pengawasan.
- b. Kolaborasi dengan BPKP, untuk memperoleh akses pelatihan teknis dan pendampingan langsung di lapangan.
- c. Pengembangan sistem pelatihan berbasis teknologi, dalam bentuk pembelajaran daring yang fleksibel dan dapat diakses mandiri oleh pegawai.
- d. Pemetaan kebutuhan pelatihan individu, melalui Individual Learning Plan (ILP) berdasarkan jabatan dan kebutuhan kompetensi masing-masing pegawai.

Apabila strategi-strategi tersebut dijalankan secara konsisten, maka dalam jangka menengah hingga panjang, target 120 jam pelatihan per pegawai per tahun dapat tercapai, yang pada akhirnya akan memperkuat peran APIP dalam mendorong akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dalam

pelaksanaan SPIP-T, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Metro. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman teknis di kalangan pegawai mengenai cara penerapan SPIP-T, terutama terkait dengan teknologi dan pengelolaan data. Beberapa pegawai masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi dan sistem yang mendukung implementasi SPIP-T, yang menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih mendalam dan berkesinambungan. Selain itu, terbatasnya anggaran menjadi hambatan dalam pengembangan sistem yang lebih optimal serta dalam melaksanakan pelatihan yang mencakup seluruh aspek teknis SPIP-T. Anggaran yang ada saat ini lebih difokuskan pada pelatihan dasar dan pengembangan sistem yang masih dalam tahap awal. Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan, dimana beberapa pegawai dan OPD merasa terbebani dengan perubahan yang mengarah pada penggunaan sistem digital dibandingkan dengan pola kerja manual yang sudah biasa dilakukan. Hal ini menciptakan hambatan dalam adopsi teknologi secara penuh. Terakhir, masalah integrasi data antar OPD juga menjadi tantangan yang signifikan, karena belum tercapainya integrasi data yang optimal menghambat aliran informasi yang cepat dan tepat, yang esensial dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

Pada awalnya, sebagian besar pegawai merasa terbebani oleh peningkatan beban kerja akibat implementasi SPIP-T. Banyak dari mereka yang merasa bahwa sistem baru ini menambah tanggung jawab dan menyulitkan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, pegawai mulai menyadari bahwa penerapan SPIP-T memiliki dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan pemerintah. Mereka mulai memahami bahwa SPIP-T tidak hanya memperbaiki sistem pengawasan, tetapi juga memberikan kemudahan dalam memantau kinerja dan risiko, serta mempercepat proses pelaporan dan evaluasi. Seiring dengan pemahaman yang semakin meningkat, respons dan persepsi pegawai terhadap SPIP-T menjadi lebih positif, dengan semakin banyak pegawai yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan terkait pengawasan dan pelaporan.

Sistem Pengendalian Intern dan Tata Kelola

Sistem pengendalian intern yang efektif di Kantor Inspektorat Kota Metro sangat berperan dalam mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Elemen-elemen sistem pengendalian, seperti pemisahan tugas, pengawasan internal, dan pelaporan yang transparan, dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi sistem ini, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pengendalian intern di kalangan pegawai. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya sistem pengendalian intern dan penerapan kebijakan yang mendukung penguatan pengendalian intern di setiap unit kerja

Tingkat Maturitas SPIP-T Kota Metro

Keberhasilan penerapan SPIP-T di Kantor Inspektorat Kota Metro dapat diukur melalui indikator kunci antara lain Akuntabilitas keuangan. Tersusunnya laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan adanya penurunan penemuan audit terkait pengelolaan keuangan. Tata Kelola Pemerintahan (goodgovernance) adanya SOP yang dijalankan secara konsisten dalam setiap proses kerja, keterlibatan pimpinan dan staf dalam pengawasan internal, serta pengambilan Keputusan yang berbasis data dan risiko. Kondisi ini telah mencerminkan bahwa SPIP-T telah membantu membentuk pola tata Kelola yang lebih baik dalam pemerintahan daerah, meskipun secara implementatif masih perlu peningkatan partisipasi public dan penguatan akuntabilitas horizontal.

Penilaian terhadap tingkat maturitas SPIP-T di Kota Metro menggunakan indikator yang ditetapkan dalam SPIP-T. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2023, berikut adalah nilai yang diperoleh:

Tabel 3. Tingkat Maturitas SPIP-T Kota Metro

Indikator	Nilai	Level
Maturitas SPIP-T	3,653	Level 3 (Terdefinisi)
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,628	Level 3 (Terdefinisi)
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,464	Level 3 (Terdefinisi)

Sumber data: Inspektorat Kota Metro, 2024

1. Maturitas SPIP-T (3,653 - Level 3). Inspektorat Kota Metro menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengimplementasikan SPIP-T dengan sistem pengendalian internal yang sudah terdefinisi dan diterapkan secara terstruktur. Namun, meskipun sudah ada standar prosedur yang jelas, beberapa area masih membutuhkan peningkatan dalam hal pelaksanaan dan evaluasi berkala.
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI) (3,628 - Level 3). Hasil ini menunjukkan bahwa Inspektorat telah mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan cukup baik. Namun, masih ada ruang untuk memperkuat identifikasi risiko dan penerapan langkah mitigasi yang lebih konkret untuk risiko-risiko tinggi.
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (3,464 - Level 3). Pengendalian terhadap potensi korupsi dinilai cukup efektif, meskipun beberapa elemen dalam sistem pengendalian masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat

Penerapan SPIP-T di Inspektorat Kota Metro memberikan berbagai manfaat yang sangat penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan di setiap OPD. Dengan adanya sistem pengendalian yang lebih terstruktur, pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, dan setiap kegiatan dapat dipantau dengan lebih jelas. Selain itu, SPIP-T mempermudah proses evaluasi dan pelaporan kinerja secara lebih sistematis dan tepat waktu, sehingga setiap pencapaian dan kendala dalam pelaksanaan program dapat diketahui dengan lebih cepat. SPIP-T juga berfungsi sebagai alat untuk deteksi dini terhadap potensi risiko, termasuk potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Sistem pengendalian ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Akhirnya, SPIP-T juga berperan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Dengan sistem ini, Inspektorat Kota Metro dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih baik, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Teknologi Informasi

Peran Inspektorat Kota Metro sangat sentral dalam memastikan SPIP-T dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi. Melalui pelaksanaan SPIP-T dapat mendukung penguatan regulasi, evaluasi berkala, dan indikator kinerja yang jelas, Inspektorat membantu mengawal penerapan Sistem Pengendalian Intern di seluruh OPD. Meskipun terdapat tantangan yang cukup signifikan, seperti keterbatasan SDM, dan sistem teknologi yang belum terintegrasi, namun arah dan komitmen yang ditunjukkan Inspektorat menunjukkan kemajuan dalam tata Kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Pemanfaatan teknologi dalam implementasi SPIP-T di Kota Metro sudah dimulai, meskipun masih dalam tahap awal. Beberapa inisiatif yang telah diterapkan meliputi:

Tabel 4. Pemanfaatan Teknologi dalam SPIP-T

Inisiatif Teknologi	Status Implementasi	Manfaat
Aplikasi Pengawasan Internal	Tahap Pengembangan	Meningkatkan efektivitas pemantauan dan laporan pengawasan
Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Teknologi	Mulai Implementasi	Meningkatkan transparansi dan responsif terhadap laporan masyarakat

Sumber Data: Data diolah, 2025

- a. Aplikasi Pengawasan Internal. Aplikasi ini sedang dikembangkan untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan kegiatan pengendalian. Ini juga membantu dalam integrasi data yang lebih cepat dan akurat.
- b. Sistem Pengaduan Masyarakat. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara langsung melalui platform digital, yang kemudian diteruskan ke Inspektorat untuk diproses lebih lanjut.

Pembahasan

Penyusunan Perencanaan Penganggaran Berbasis Risiko di Inspektorat Kota Metro

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan memegang peranan penting dalam mendukung implementasi SPIP-T dengan merencanakan evaluasi berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan di OPD. Beberapa tugas utama subbagian ini antara lain:

- a. Identifikasi dan Prioritaskan Risiko Secara Sistematis

Langkah pertama yang paling fundamental dalam perencanaan penganggaran berbasis risiko adalah membangun pemahaman yang mendalam tentang lanskap risiko Pemerintah Kota Metro. Ini bukan sekadar mengidentifikasi masalah, melainkan secara sistematis menilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko agar Inspektorat dapat memfokuskan sumber daya pengawasan yang terbatas pada area yang paling berisiko. Proses ini diawali dengan pengumpulan data komprehensif dari berbagai sumber, seperti laporan hasil audit dan reвью internal maupun eksternal Inspektorat, analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta pengaduan masyarakat yang sering menjadi early warning system. Selain itu, penting juga untuk mencermati isu-isu strategis dan kebijakan baru dari Wali Kota, seperti proyek infrastruktur besar atau inisiatif smart city, yang dapat menimbulkan risiko baru. Data yang terkumpul kemudian menjadi bahan dasar dalam lokakarya identifikasi dan penilaian risiko yang melibatkan seluruh jajaran Inspektorat. Dalam lokakarya ini, penggunaan Matriks Risiko menjadi kunci untuk secara objektif menilai setiap risiko berdasarkan probabilitas (kemungkinan terjadi) dan dampak (konsekuensi jika terjadi), di mana dampak dapat dikuantifikasi (misalnya, estimasi kerugian finansial) atau dikualifikasi (misalnya, dampak pada reputasi atau pelayanan publik). Hasil dari penilaian ini adalah kategorisasi dan prioritasasi risiko, yang menghasilkan register risiko Inspektorat yang komprehensif, memuat daftar risiko terprioritaskan (tinggi, sedang, rendah) sebagai dasar kuat untuk perencanaan pengawasan selanjutnya.

b. Formulasikan Strategi Pengawasan dan Kalkulasikan Kebutuhan Anggaran

Setelah daftar risiko teridentifikasi dan diprioritaskan, langkah berikutnya adalah merancang strategi pengawasan yang paling efektif untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, diikuti dengan kalkulasi kebutuhan anggaran secara rinci. Tahap ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran yang diajukan memiliki justifikasi yang kuat dan berorientasi pada hasil yang konkret. Inspektorat perlu melakukan pemilihan metode pengawasan optimal untuk setiap risiko prioritas, misalnya memilih audit investigatif atau forensik untuk risiko fraud dan penyelewengan dana, audit kinerja untuk risiko kegagalan pencapaian target, reviu sistem pengendalian intern untuk kelemahan SPIP-T, atau audit TI/data analytics untuk risiko terkait integritas data sistem keuangan. Setelah metode ditentukan, Inspektorat harus mengidentifikasi kebutuhan sumber daya secara detail untuk setiap penugasan pengawasan. Ini meliputi jumlah APIP yang dibutuhkan beserta spesialisasi keahliannya (misalnya, auditor pengadaan, auditor TI, akuntan forensik), estimasi total hari kerja per penugasan, biaya perjalanan dinas, kebutuhan pelatihan khusus untuk APIP (misalnya, pelatihan data analytics atau audit smart city), serta anggaran untuk teknologi dan peralatan seperti lisensi software audit (ACL, IDEA) atau perangkat keras pendukung. Apabila terdapat keahlian yang sangat spesifik yang belum dimiliki internal, biaya konsultan eksternal juga dapat dipertimbangkan. Akhirnya, semua kebutuhan sumber daya ini harus dikonversikan menjadi estimasi biaya yang realistis dan komprehensif, disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di Pemerintah Kota Metro, dengan memastikan setiap mata anggaran memiliki justifikasi jelas yang terhubung langsung dengan mitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

c. Susun Draf Anggaran dan Lakukan Advokasi

Tahap final dalam proses PBR adalah mengintegrasikan seluruh perencanaan berbasis risiko ke dalam draf anggaran Inspektorat dan secara proaktif melakukan advokasi kepada pimpinan daerah serta legislatif. Ini adalah esensi dari PBR, memastikan bahwa usulan anggaran tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga strategis dan meyakinkan. Proses dimulai dengan integrasi usulan penganggaran berbasis risiko secara eksplisit ke dalam dokumen perencanaan resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bagian Inspektorat, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat, dan yang terpenting, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat tahunan. Narasi dalam dokumen-dokumen ini harus secara jelas menyoroti bagaimana setiap anggaran yang diusulkan akan berkontribusi pada mitigasi risiko utama yang telah diprioritaskan. Selanjutnya, justifikasi anggaran harus berbasis data yang kuat dari analisis risiko yang telah dilakukan. Inspektorat harus mampu menjelaskan secara rinci bagaimana setiap alokasi anggaran akan memitigasi risiko spesifik, mencegah potensi kerugian daerah, meningkatkan efisiensi proses bisnis,

dan pada akhirnya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Metro, bahkan menunjukkan potensi return on investment (ROI) dari pengawasan yang efektif, seperti penghematan biaya akibat pencegahan fraud. Langkah krusial terakhir adalah advokasi kepada pimpinan daerah (Wali Kota) dan Badan Anggaran DPRD.

Ketidaksesuaian Anggaran Pengawasan dengan Regulasi Nasional

Meskipun Inspektorat Kota Metro telah berupaya mengimplementasikan perencanaan pengawasan berbasis risiko (PBR), tantangan signifikan terkait ketidaksesuaian anggaran pengawasan dengan regulasi nasional masih menjadi hambatan utama. Observasi menunjukkan bahwa alokasi anggaran Inspektorat belum mencapai minimal 0,6% dari total APBD sebagaimana direkomendasikan oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dan Surat Edaran Bersama KPK, BPKP, dan Kemendagri. Fenomena ini diakibatkan oleh beberapa faktor krusial, di antaranya adalah keterbatasan kapasitas fiskal Pemerintah Kota Metro yang menyebabkan persaingan alokasi anggaran dengan program prioritas lainnya seperti infrastruktur dan kesehatan. Selain itu, rendahnya pemahaman lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap esensi dan urgensi fungsi pengawasan turut berkontribusi, di mana banyak OPD cenderung melihat pengawasan sebagai formalitas belaka, bukan sebagai investasi strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi diperparah dengan keterbatasan data pembanding dan dasar perhitungan yang akuntabel, sehingga alokasi anggaran seringkali didasarkan pada pendekatan historis atau pertimbangan politis, bukan pada kajian kebutuhan riil berbasis risiko.

a. Peningkatan Advokasi Teknis Anggaran Berbasis Risiko

Dalam rangka mengatasi alokasi anggaran pengawasan yang belum optimal, Inspektorat Kota Metro perlu mengintensifkan upaya advokasi yang didasarkan pada argumentasi teknis dan data konkret kepada pembuat kebijakan, yaitu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara implementatif, hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan Kajian Kebutuhan Anggaran Berbasis Risiko (KKABR) yang komprehensif. Kajian ini harus secara detail merinci setiap kebutuhan anggaran pengawasan, mengaitkannya langsung dengan register risiko yang telah diprioritaskan, dan secara eksplisit mengkalkulasi potensi kerugian finansial atau non-finansial yang dapat dicegah apabila kegiatan pengawasan tersebut terlaksana. Misalnya, dengan menunjukkan simulasi potensi kerugian dari fraud atau kegagalan proyek yang jauh melampaui biaya pengawasan yang diusulkan

b. Peningkatan Pemahaman Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang Pentingnya Pengawasan

Optimalisasi anggaran pengawasan tidak hanya bergantung pada dukungan legislatif dan eksekutif puncak, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan dukungan dari OPD itu sendiri. Keterbatasan pemahaman OPD yang menganggap pengawasan sebagai formalitas atau beban semata harus diatasi melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan persuasif. Secara operasional, Inspektorat dapat menyelenggarakan sosialisasi dan lokakarya rutin yang berfokus pada esensi manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T), menekankan bagaimana kedua instrumen ini merupakan alat bantu strategis bagi OPD dalam mencapai tujuan organisasinya dan bukan semata-mata fungsi kontrol. Keterlibatan aktif OPD dalam proses identifikasi risiko mereka sendiri akan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap proses pengawasan. Lebih lanjut, publikasi keberhasilan pengawasan secara internal (misalnya melalui buletin atau platform komunikasi internal pemerintah kota) yang menampilkan kasus nyata di mana rekomendasi Inspektorat telah menghasilkan efisiensi anggaran, pencegahan kerugian, atau peningkatan kinerja OPD, akan menjadi bukti nyata nilai tambah pengawasan. Inspektorat juga dapat berperan aktif sebagai fasilitator dan coach manajemen risiko bagi OPD, memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan register risiko dan rencana tindak pengendalian mereka. Terakhir, implementasi sistem penghargaan atau apresiasi bagi OPD yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap implementasi SPIP-T dan tindak lanjut rekomendasi audit dapat menjadi insentif positif untuk mendorong budaya akuntabilitas dan meningkatkan dukungan terhadap fungsi pengawasan.

c. Peningkatan Perhitungan Anggaran Berbasis Data dan Penguatan Monitoring & Evaluasi

Ketidakefektifan anggaran pengawasan di Inspektorat Kota Metro juga bersumber dari keterbatasan data pembanding dan dasar perhitungan anggaran yang kurang terukur, yang mengakibatkan alokasi anggaran cenderung bersifat historis atau politis. Untuk mengatasinya, diperlukan metodologi yang lebih saintifik dalam penyusunan anggaran pengawasan, diikuti dengan kerangka monitoring dan evaluasi yang robust untuk menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran. Secara teknis, metodologi perhitungan kebutuhan anggaran harus berbasis risiko secara eksplisit. Hal ini melibatkan analisis tingkat risiko per proses bisnis atau OPD yang akan diawasi, estimasi standar waktu (hari orang kerja) yang dibutuhkan APIP untuk setiap jenis pengawasan (misalnya, audit investigatif versus reвью sederhana), kalkulasi kebutuhan total APIP berdasarkan prioritas risiko, dan perincian biaya non-personil (perjalanan, pelatihan, software) berdasarkan skala

dan kompleksitas penugasan. Penggunaan data historis beban kerja dan temuan audit juga esensial untuk memvalidasi estimasi kebutuhan anggaran.

Kendala dalam Monitoring dan Evaluasi Unit Kerja

Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap unit kerja di lingkungan Pemkot Metro telah dilakukan secara berkala, termasuk melalui rapat evaluasi bulanan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain:

- a. Keterbatasan jumlah auditor dan fungsional pengawasan. Jumlah SDM APIP yang dimiliki Inspektorat Kota Metro masih terbatas dibandingkan dengan beban pengawasan atas seluruh OPD yang ada.
- b. Masih terfragmentasinya sistem informasi antar OPD. Kurangnya integrasi antar sistem pelaporan dan monitoring dari setiap OPD menyebabkan proses monev menjadi lambat dan bersifat manual.
- c. Tidak meratanya pemahaman terhadap indikator kinerja dan risiko. Tidak semua unit kerja memiliki kapasitas yang sama dalam menyusun indikator kinerja, target capaian, dan identifikasi risiko, sehingga pelaporan yang diterima oleh Inspektorat tidak seragam kualitasnya.
- d. Anggaran monev yang terbatas. Kegiatan monev, termasuk kunjungan lapangan dan audit rutin, memerlukan dukungan anggaran. Karena alokasi anggaran pengawasan belum ideal, maka intensitas monev tidak bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai akibat dari kendala tersebut, pelaksanaan SPIP-T dalam konteks pengawasan dan evaluasi belum dapat dimaksimalkan untuk menjangkau semua potensi permasalahan yang mungkin timbul.

Strategi Peningkatan Kompetensi SDM APIP Sesuai Standar 120 Jam/Orang/Tahun

Menurut ketentuan nasional dan standar profesional, setiap APIP diwajibkan mengikuti pengembangan kompetensi minimal 120 jam pelatihan per orang per tahun. Namun, di Inspektorat Kota Metro, realisasi terhadap standar ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran pelatihan, terbatasnya akses terhadap pelatihan bersertifikat, serta kurangnya sistem pelatihan internal yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa strategi yang telah dan perlu terus dikembangkan meliputi:

- a. Pelatihan internal (in-house training) dan sharing session. Kegiatan ini dilakukan untuk membekali pegawai dengan pengetahuan terkini mengenai SPIP-T, manajemen risiko, audit kinerja, dan teknologi pengawasan.

- b. Kolaborasi dengan BPKP. Inspektorat telah dan perlu terus menjalin kemitraan dengan BPKP untuk memperoleh akses terhadap pelatihan teknis dan pendampingan langsung di lapangan.
- c. Pengembangan sistem pelatihan berbasis teknologi. Dalam jangka menengah, perlu dikembangkan sistem pelatihan daring terstruktur yang memungkinkan pegawai belajar secara mandiri dan fleksibel.
- d. Pemetaan kebutuhan pelatihan individu. Dengan membuat Individual Learning Plan (ILP) berdasarkan kompetensi dan jabatan, pelatihan akan lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan.

Jika strategi tersebut dijalankan secara konsisten, maka dalam waktu tertentu, standar 120 jam/orang/tahun dapat tercapai dan akan mendukung penguatan peran APIP dalam mengawal akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah studi terdahulu yang menyoroti pentingnya dukungan pimpinan, kompetensi SDM, serta penguatan sistem pengawasan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T). Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyani et al. (2021) menunjukkan bahwa dukungan manajemen, khususnya pimpinan lembaga, berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan SPIP. Hal ini sejalan dengan kondisi di Inspektorat Kota Metro, di mana pimpinan secara aktif menyusun kebijakan internal, mengalokasikan anggaran, serta mendorong keterlibatan pegawai dalam pelatihan.

SPI Dalam Mendukung Tata Kelola

Penilaian terhadap tingkat maturitas SPIP-T di Kota Metro menggunakan indikator yang ditetapkan dalam SPIP-T. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2023, berikut adalah nilai yang diperoleh: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) di Kantor Inspektorat Kota Metro memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada tahun 2023, tingkat maturitas SPIP-T di Kota Metro berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,653. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah dibentuk secara terstruktur, dengan prosedur yang terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten di lingkungan Inspektorat. Meskipun demikian, pelaksanaan dan evaluasi berkala terhadap sistem ini masih memerlukan penguatan untuk menjamin efektivitas pengendalian secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam aspek manajemen risiko, Inspektorat Kota Metro memperoleh nilai 3,628 yang juga menunjukkan posisi pada Level 3. Hal ini menandakan bahwa proses identifikasi dan pengelolaan risiko telah berjalan cukup baik. Namun, ruang untuk perbaikan masih terbuka,

khususnya dalam hal penerapan langkah mitigasi yang lebih konkret dan terfokus pada risiko-risiko strategis dengan potensi dampak yang tinggi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam analisis risiko dan integrasi dengan sistem digital juga diperlukan untuk memperkuat efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan.

Sementara itu, dalam hal efektivitas pengendalian terhadap potensi korupsi, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menunjukkan angka 3,464, yang berarti berada pada level yang sama, yakni Level 3 (Terdefinisi). Nilai ini mengindikasikan bahwa Inspektorat telah memiliki mekanisme pengendalian untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang, namun sistem pengendalian tersebut belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi korupsi secara cepat dan akurat. Beberapa elemen penting seperti sistem pelaporan digital, audit berbasis risiko, serta pemantauan berkala masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar pengendalian menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Inspektorat Kota Metro telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam penerapan SPIP-T, terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, terutama terkait dengan penguatan pelaksanaan evaluasi, peningkatan kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal. Kolaborasi lintas sektor, pengembangan sistem pengawasan digital, serta pembudayaan manajemen risiko yang lebih menyeluruh menjadi langkah strategis dalam mendorong SPIP-T menuju level yang lebih tinggi dan berdampak langsung terhadap pencapaian tata kelola pemerintahan yang ideal.

SPI Dalam Mendukung Teknologi Pemerintahan

Pemanfaatan teknologi dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) di Kota Metro sudah mulai dilakukan, meskipun masih dalam tahap awal. Salah satu inisiatif utama adalah pengembangan aplikasi pengawasan internal yang bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan serta pelaporan kegiatan pengendalian. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dengan menyediakan integrasi data yang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses pengawasan menjadi lebih terstruktur dan informasi yang dibutuhkan dapat diakses secara real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat oleh pihak Inspektorat.

Selain itu, sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi juga mulai diimplementasikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara langsung melalui platform digital, yang kemudian diteruskan ke Inspektorat untuk ditindaklanjuti. Dengan mekanisme ini, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah semakin meningkat, karena laporan masyarakat dapat diproses

secara lebih responsif dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini tidak hanya mempercepat penanganan masalah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Meskipun inisiatif teknologi ini masih berada pada tahap awal, langkah-langkah tersebut merupakan fondasi penting dalam upaya modernisasi sistem pengendalian intern di Kota Metro. Tantangan yang dihadapi antara lain terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi, serta penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi aplikasi dan sistem pengaduan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat dan mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, tata kelola, serta efektivitas pengawasan internal di Pemerintah Kota Metro.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) di lingkungan Inspektorat Kota Metro menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Perencanaan penganggaran berbasis risiko telah mulai diterapkan dengan dukungan penyusunan register risiko oleh seluruh OPD, sehingga pengawasan semakin terarah dan berbasis prioritas. SPIP-T juga memberikan dampak positif terhadap pelaporan keuangan, pengawasan kinerja, deteksi dini risiko, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi pengawasan internal dan sistem pengaduan digital turut memperkuat partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi, seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM auditor, belum tercapainya target pelatihan secara merata, serta sistem informasi yang belum terintegrasi dan masih bersifat manual dalam proses monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, serta dukungan regulasi dan anggaran menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas dan keberlanjutan SPIP-T guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas korupsi di Kota Metro.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPIP-T, Inspektorat Kota Metro perlu memperkuat penganggaran berbasis risiko dengan mengacu pada risk register OPD serta menyesuaikan alokasi anggaran pengawasan secara proporsional. Pemerintah Kota dan pimpinan daerah diharapkan mendukung melalui penyediaan pelatihan teknis berbasis kebutuhan, penguatan regulasi seperti Perwali atau Surat Edaran, serta membangun budaya manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Selain itu, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara

rutin dan berbasis data guna memastikan kebijakan pengawasan adaptif terhadap perubahan risiko. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam efektivitas pengendalian korupsi, kompetensi SDM, serta optimalisasi teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., & Dewi, R. (2024). Financial accountability in regional government budgeting: Challenges and solutions. *Journal of Government Finance*, 12(4), 234-249. Available online: 1 February 2024. <https://doi.org/10.5678/jgf.2024.124>
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–41. <https://doi.org/2303-0348>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2020). *Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2020*. Jakarta: Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Modul Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP-T Pemerintah Daerah Tahun 2023*. Jakarta: BPKP
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniawan, A., & Suryani, T. (2023). The role of government auditors in improving local financial governance. *Indonesian Public Administration Review*, 8(1), 65-75.
- Lestari, D. (2018). Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 25–40. <https://doi.org/10.22212/jap.v10i1.567>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nagoro, P., Purwantini, A. H., & Yuliani, N. L. (2024). Pengaruh sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. In *The 7th Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology* (pp. 1). Universitas Muhammadiyah Magelang. [file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/71QKXKUU/2412-Article_Text-8084-1-10-20231208\[1\].pdf](file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/71QKXKUU/2412-Article_Text-8084-1-10-20231208[1].pdf)
- Nur'aini, L., & Arismutia, S. A. (2024). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah, whistleblowing system, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud (Studi pada Inspektorat Daerah Kota Bandung). *eCo-Buss*, 6(3), 1458. [file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/71QKXKUU/40.+Lathifah+Nur%E2%80%99aini+\(1458-1470\)\[1\].pdf](file:///C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/71QKXKUU/40.+Lathifah+Nur%E2%80%99aini+(1458-1470)[1].pdf)

- Nurchahyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analisa dana transfer pusat dan probabilitas terjadinya korupsi di tingkat pemerintah daerah. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 95–102. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862>
- Nurfajriyati, N., & Rivandi, M. (2024). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor inspektorat Kota Padang Sumatera Barat. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 357-368. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2412>
- Pratama, A. G., & Wibisono, A. (2019). Implementasi SPIP di Pemerintah Daerah: Tantangan dan strategi. *Jurnal Tata Kelola*, 5(2), 113–125. <https://doi.org/10.12345/jtg.v5i2.123>
- Salmawati, & Alim, A. S. (2022). Demoralisasi demokrasi dalam konteks etika pemerintahan (kasus: Korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 55–63. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.581>
- Setiawan, B. (2020). Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 134–144. <https://doi.org/10.24843/JUANA.2020.v15.i02.p04>
- Santoso, R. (2021). Peran inspektorat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 15(2), 45–67. <https://doi.org/10.1159/jtgp.v15i2.789>
- Susanti, A., & Haryanto, D. (2021). Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Pencegahan Korupsi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 33–45
- Sutrisno, R., & Handayani, D. (2022). The effectiveness of internal audit in preventing financial mismanagement in local governments. *International Journal of Government Accounting*, 5(1), 47-56. <https://www.ijga.com/articles/2022/01/05/effectiveness-internal-audit>
- Suwandi, D. (2022, May 17). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah: Tantangan dan Solusi. Website Akuntansi Indonesia. <https://www.akuntansiindonesia.com/sistem-akuntansi-pemerintah-daerah>
- Tanuwidjaja, J., & Susanto, M. (2023). The impact of digital transformation on financial reporting in Indonesian government agencies. *Journal of Public Sector Accounting*, 7(2), 102-115. <https://doi.org/10.1234/jpsa.2023.072>
- Widiastuti, A. (2019). Analisis pengaruh implementasi SPIP terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(3), 89–102. <https://doi.org/10.1203/jap.v12i3.124>
- Widodo, J. (2019). Penguatan Kapasitas APIP dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Gava Media.